

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN DEGRADASI MORAL DI ERA GLOBALISASI

Oleh :

SAKMAN¹, BAKHTIAR²

¹FKIP Universitas Palangka Raya, sakman@fkip.upr.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial, Univeritas Negeri Makassar, bakhtiar@unm.ac.id

ABSTRAK: Era globalisasi ditandai saling keterbukaan dan ketergantungan antar negara menjadikan negara tidak mengenal batas-batasnya (*borderless state*) sehingga arus informasi dan telekomunikasi berkembang sangat pesat. Kompetisi antar negara semakin ketat, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan pendidikan. Bagi Indonesia era globalisasi ini tidak hanya mengarah pada kepentingan dalam negeri akan tetapi juga mengarah pada kepentingan global. Menghadapi era globalisasi harus disertai dengan penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda untuk menangkal dekadensi moral. Oleh karena perlu mengantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Melalui Pendidikan Kewarganegeraan, akan membangun, membentuk, dan membina karakter generasi muda sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perkembangan zaman disikapi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan era globalisasi dihadapi dengan membekali manusia Indonesia terutama generasi muda untuk sadar akan budaya luhur bangsa yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan kewarganegaraan.

KATA KUNCI: *Pendidikan, Kewarganegaraan, Degradasi, Moral, Globalisasi*

ABSTRACT: The era of globalization is marked by mutual openness and dependence between countries, making the country do not recognize its boundaries (*borderless state*) so that the flow of information and telecommunications is developing very rapidly. Competition between countries is getting tougher, both in the economic, political, socio-cultural, defense and education fields. For Indonesia this era of globalization not only leads to domestic interests but also to global interests. Facing the era of globalization must be accompanied by strengthening the character education for young people to ward off moral decadence. Because it is necessary to anticipate it through citizenship education as part of character education. Through Citizenship Education, will build, shape, and foster the character of the young generation in accordance with the noble values of the nation in accordance with the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The challenges of the globalization era are faced by equipping Indonesian people, especially the younger generation, to be aware of the nation's sublime culture which is a pillar of community, nation and state life through citizenship education.

KEY WORDS: Education, Citizenship, Degradation, Morals, Globalization

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini dengan adanya saling keterbukaan dan ketergantungan antar negara menjadikan negara tidak mengenal batas-batasnya sehingga arus informasi dan telekomunikasi pun berkembang sangat pesat maka persaingan Internasional pun akan semakin ketat terutama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan pendidikan, khususnya bagi Indonesia era globalisasi ini tidak hanya mengarah pada kepentingan dalam negeri akan tetapi juga mengarah pada kepentingan global sehingga terdapat peluang yang dimiliki oleh negara berkembang khususnya Indonesia, yaitu: (1) Dapat hidup di dalam dunia yang lebih terbuka atau dunia yang tanpa batas; (2) dapat mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia; (3) dapat menjadikan masyarakat Indonesia memiliki pola pikir global dan pola tindak kompetitif, suka bekerja keras, memiliki etos kerja, kreatif, mau belajar untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi kerja; (4) terjadinya perdagangan bebas yang makin meningkatkan kerjasama regional misalnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) memerlukan manusia-manusia yang berkualitas tinggi; (5) meningkatkan peluang baru bagi pembangunan ekonomi di Indonesia; (6) Meningkatkan SDM Indonesia yang berkualitas tinggi untuk bersaing dalam kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh negara berkembang khususnya Indonesia yaitu: (1) Kelompok negara-negara maju akan lebih dominan pengaruhnya terhadap kelompok negara-negara berkembang terutama pada bidang politik dan ekonomi; (2) kelompok

negara-negara berkembang tetap pada posisi yang lemah dalam kompetisi, walaupun secara teori kompetisi itu dilakukan dalam konteks kerjasama; (3) terjadi perubahan dalam cara kehidupan masyarakat terutama generasi muda yang tinggal di kota-kota; (4) semakin mudahnya komunikasi internasional, masyarakat dapat mengetahui inovasi global tentang perkembangan ilmu dan teknologi, sebaliknya dapat membawa pengaruh negatif pada kehidupan generasi muda. Contohnya adalah masalah Narkoba yang sudah melanda generasi muda Indonesia termasuk siswa SLTP/SLTA dan mahasiswa perguruan tinggi; (5) peningkatan mutu pendidikan Indonesia baik untuk memenuhi SDM yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global.

Menurut H.A.R. Tilar (2000: 19-23) untuk menjawab tantangan sekaligus peluang kehidupan global di atas, diperlukan paradigma baru pendidikan, yaitu: (1) Pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis; (2) pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis; (3) pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global; (4) pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis; (5) pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan kompetisi di dalam rangka kerjasama; (6) pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju kepada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat; (7) pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia.

Selain itu, globalisasi membawa gaya hidup kebarat-baratan yang cenderung melemahkan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya di Indonesia pengaruh globalisasi telah mempengaruhi aspek pendidikan yang berdampak pada pola pikir, pola sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil survey Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia tentang semangat nasionalisme. Disebutkan bahwa 83,3 % responden mengaku bangga sebagai orang Indonesia. Sementara 5,5% mengatakan tidak bangga dan sisanya 11, 2% menjawab tidak tahu. Namun, jika dibandingkan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun yang sama menandakan penurunan. Dimana sebanyak 92,1% menjawab bangga sebagai orang Indonesia, 4,2% mengatakan tidak bangga dan sisanya 3,7% menjawab tidak tahu.

Oleh karena melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya di era globalisasi secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dan “membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial”.

Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dihadapi bangsa ini berasal dari dalam (internal). Masalah korupsi, masalah paham individualisme, masalah lingkungan, masalah kesadaran perpajakan, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan, masalah dekadensi moral, masalah terorisme, sampai masalah disintegrasi bangsa. Penulis yakin daftar masalah-masalah tersebut pasti akan bertambah panjang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin tinggal landas, tidak lagi tertinggal dari negara-negara lain di dunia, bahkan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia, Indonesia harus mampu menangani masalah-masalah tadi dengan tepat. (Indrawan, J., & Aji, M. P., 2018).

PENDIDIKAN KEWARGA- NEGARAAN DI ERA GLOBALISASI

Era globalisasi didorong oleh kebangkitan era digital. Era digital tidak hanya ditandai dengan globalisasi di segala bidang tapi nampaknya juga telah membawa kita pada akibat-akibat secara global. Degradasi lingkungan dan kerusakan alam yang dialami oleh manusia tidak terbatas teritori (Nagra, 2010). Gagasan pembentukan *ecological citizenship* (kewarganegaraan ekologis) sangat penting untuk mengembalikan tanggung-jawab warga negara terhadap ekologi. Kewarganegaraan ekologis hakikatnya juga meliputi pemahaman tentang isu-isu ekologi, hak-hak, tanggung jawab warga negara dalam isu lingkungan hidup. Tidak hanya itu, kewarganegaraan ekologis juga mencakup upaya untuk mengatasi masalah lingkungan sekaligus untuk mempromosikan interaksi manusia yang

positif dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitar (Clarke & Agyeman, 2011:1775; Latta, 2007:18). Jika dikaitkan dengan konteks warga negara di era digital, dimana media sosial menjadi media untuk membuat perubahan dan pemberdayaan masyarakat (Lupton, 2013), maka peluang membangun kewarganegaraan ekologis akan semakin terbuka. (Jannah, R., 2018).

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa pada masa depan, komputer dan mereka akan makin sering berbagi tugas menurut kelebihan masing-masing. Mereka akan memakai daya komputasi untuk memori tanpa batas, pemrosesan maha cepat, dan aksi-aksi yang dibatasi kemampuan biologis. Namun agar pemanfaatan maksimal sungguh-sungguh mampu membawa dunia ke arah positif, diperlukan pikiran yang jernih dan selektif. Singkatnya agar utilitas teknologi selaras dengan nilai-nilai manusia, maka diperlukan kecerdasan dan ketajaman membedakan mana yang bernilai intrinsik dan mana yang bernilai instrumental. Dalam kaitan dengan itulah berpikir kritis sangat urgen untuk dibangkitkan terus menerus, terutama di kalangan generasi muda. (Sihotang, K., 2017).

Menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Senada dengan itu, Merphin Panjaitan juga mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan wujud nyata dalam pembentukan masyarakat

atau warga negara menjadi masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan dalam penerapannya di dunia pendidikan, mengajarkan mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional, sehingga penanaman nilai-nilai kewarganegaraan lewat kurikulum sangat berperan penting dalam mempersiapkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai kewarganegaraan yang sesuai dengan tujuan kewarganegaraan. Menurut Depdiknas (2006: 49) nilai-nilai kewarganegaraan yang sesuai dengan tujuan kewarganegaraan, yaitu: (1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadara dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006, visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: (1) Visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan untuk mengantarkan pembelajar membentuk kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa pembelajar sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. (2) Misi Pendidikan

Kewarganegaraan adalah untuk membantu pembelajar membentuk kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Selain visi dan misi tersebut di atas terdapat tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu: (1) Tujuan Umum untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada pembelajar mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan dasar bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. (2) Tujuan Khusus untuk pembelajar agar: (a) Memahami dan melaksanakan akan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab; (b) Menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional; (c) memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Dalam pendidikan formal, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pendidikan tentang kewarganegaraan dan membangun karakter peserta didik (*Character Building*) sesuai dengan Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan pendidik, yaitu: (1) Dalam pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan kewarganegaraan meliputi semua

permasalahan yang berhubungan dengan nilai pribadi sampai dengan nilai etika yang bersifat umum. Selain itu, pendidik juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diajarkan kepada peserta didik agar pendidik dapat membuat RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif. (2) Metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik harus dapat mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti penanaman nilai melalui studi pustaka, klarifikasi nilai melalui mengamati/mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah/kasus, maupun diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif. (3) Pendidik hendaknya menjadi contoh bagi peserta didik sebagai manusiayang memiliki karakter yang dapat di conoh oleh peserta didiknya.

Untuk mewujudkan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Sehingga, kultur yang ada di sekolah seperti norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah agar berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesanpeserta didik dan pendidik.

Dalam mencapai tujuan ini pendidikan kewarganegaraan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran agama. Disini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraanmenjadi dasar dan motor dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ada dan pendidiknya menjadi pengontrol dan pembimbing dalam pelaksanaannya. Dalam penerapannya, pendidik harus dibantu oleh semua warga

sekolah melalui kerjasama yang baik antara semua pihak, baik oleh kepala sekolah, pendidik, peserta didik, serta komite sekolah.

Kenyataan saat ini terjadi kemerosotan moral di kalangan generasi muda khususnya para pelajar tingkat menengah di Indonesia, yaitu: (1) Tingkat perkosaan semakin meningkat tiap tahunnya, tercatat tahun 2013 setiap bulan tiga sampai empat kasus perkosaan di seluruh Indonesia. Tahun 2014, empat hingga enam setiap bulan, 50 persen pelaku perkosaan adalah anak berusia di bawah 20 tahun dan sebagian dari para remaja tersebut memperkosa teman perempuannya. (2) Tingkat aborsi semakin meningkat, sejak tahun 2012 hingga 2014 bulan Juli, kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta orang dengan rician per tahun kasus aborsi 750 ribu per tahun atau 7 ribu dalam sehari dan 30 persen pelakunya adalah remaja SMP dan SMA. Kenyataan bahwa tingginya remaja yang melakukan aborsi disebabkan meningkatnya tingkat pemerkosaan dan hubungan suka sama suka atau pergaulan bebas. (3) Tingkat tawuran semakin meningkat, untuk tahun 2011 terdapat 96 kasus dengan korban meninggal 12. Dan untuk tahun 2012 terdapat 103 kasus tawuran dengan jumlah korban tewas 17 orang. (4) Tingkat penggunaan narkoba sejak 2010 sampai 2013 tercatat ada peningkatan jumlah pelajar dan mahasiswa yang menjadi tersangka kasus narkoba. Pada 2010 tercatat ada 531 tersangka narkoba, jumlah itu meningkat menjadi 605 pada 2011. Setahun kemudian, terdapat 695 tersangka narkoba, dan tercatat 1.121 tersangka pada 2013.

Pada tahun 2011 BNN juga melakukan survei nasional perkembangan penyalah-gunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa. Dari penelitian di 16 provinsi di tanah air, ditemukan 2,6

persen pelajar SLTP sederajat pernah menggunakan narkoba, dan 4,7 persen pelajar SMA terdapat pernah memakai narkoba.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengaruh globalisasi yang tidak disertai dengan penguatan pendidikan karakter bagi pelajar telah mengakibatkan terjadinya kemerosotan moral bagi generasi muda bangsa. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, untuk itu pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter berperan penting untuk menurunkan kemerosotan moralitas pelajar di era globalisasi saat ini, dengan membangun dan membentuk karakter pelajar sesuai dengan yang tecantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. “Zaman boleh berkembang, sebaik apapun perkembangan zaman tetap jagalah ketegakan nilai-nilai Pancasila dan tanamkan kepada siswa agar mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika satu saja nilai Pancasila tidak dilaksanakan maka karakter siswa akan anjlok bahkan tidak lagi memiliki moral” (Azizan, N., & Lubis, M. A., 2018).

Tantangan era globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat dirasakan dengan adanya berbagai fasilitas teknologi dan komunikasi yang sangat memudahkan manusia. Namun begitu pula dengan dampak negatif yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Maka dari itu, untuk dapat membekali manusia Indonesia menghadapi tantangan global perlu adanya suatu pendidikan dalam masyarakat untuk sadar budaya luhur bangsa yang menjadi pilar kehidupan. (Mumpuni, S. D., & Nurpratiwiningsih, L., 2018).

PENUTUP

Timbulnya pengaruh globalisasi yang tidak disertai dengan penguatan pendidikan karakter bagi pelajar akan mengakibatkan dekadensi moral bagi generasi muda bangsa. Oleh karena perlu mengantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dengan membangun dan membentuk karakter generasi muda sesuai dengan yang tecantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Zaman boleh berkembang, seriring menanamkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan era globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif, sehingga perlu membekali manusia Indonesia terutama generasi muda, dalam menghadapi tantangan global perlu adanya suatu pendidikan dalam masyarakat untuk sadar budaya luhur bangsa yang menjadi pilar kehidupan bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizan, N., & Lubis, M. A. (2018). *Pengembangan Karakter Siswa Sekolah Dasar Berbasis Pancasila di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Fauziah, Tatik. 2016. *Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme*. Aceh: Jurnal pendidikan serambi ilmu.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2018). Pendidikan Bela Negara Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8 (3).
- Jannah, R. (2018). Menciptakan Kewarganegaraan Ekologis di Era Digital Melalui Kampoeng Recycle Jember. *Journal of Urban Sociology*, 1(2), 14-26.
- Juliati. 2015. Mobilitas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Bandung: Jurnal Pendidikan STKIP PGRI Sukabumi.
- Mumpuni, S. D., & Nurpratiwiningsih, L. (2018). Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Menghadapi Pergeseran Budaya di Era Milenial. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(1), 1-10.
- Purwanti, A. (2017). Prosiding Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI: Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sihotang, K. (2017). Berpikir Kritis: Sebuah Tantangan dalam Generasi Digital. *Jurnal Etika Respons*, 22(02).
- Sa'diyah El Adawiyah, S., & Swarnawati, A. Hubungan Media Baru dengan Sikap Nasionalisme Remaja di DKI Jakarta. *Information and Communication Technology*, 95.
- Setyawan, D. 2014. Tawuran Pelajar Memprihatinkan Dunia Pendidikan. Diakses tanggal 9 Desember 2016.
- Tryas. 2014. 22 Persen Pengguna Narkoba Kalangan Pelajar. <http://www.harianterbit.com/read/2014/09/13/8219/18/18/22-Persen-Pengguna-Narkoba-Kalangan-Pelajar>. diakses tanggal 9 Desember 2016.

Wignjosoebroto, S. 1997. "Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial, alam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, ed. Perempuan dalam Wacana Perkosaan , Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Yogyakarta.

Wulansari, N. M. D. (2017). *Didiklah Anak Sesuai Zamannya: Mengoptimalkan Potensi Anak Di Era Digital*. Visimedia.